

Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan (Kantor Walikota Medan)

Fera Afifah

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: Fera.afifah031@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif yang bersifat kausal. Metode penelitian menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 32 SKPD. Seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan pengajuan ganti uang persediaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. Secara parsial variabel perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan, sedangkan administrasi dan dokumen pengadaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Perencanaan, Administrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut sebagai UU Otonomi Daerah serta UU Nomor 25 tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara dan menjadi titik awal dari lahirnya era otonomi daerah di Indonesia (Arifdan Halim, 2013).

Salah satu tujuan dari dikeluarkannya paket UU tersebut yaitu agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, serta tantangan persaingan global (Arif dan Halim, 2013). Dengan dikeluarkannya paket regulasi UU tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan dalam suatu pemerintahan, karena anggaran akan berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Kinerja pimpinan publik akan dinilai berdasarkan hasil pencapaian target anggaran. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009).

Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan ekonomi adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu penyerapan anggaran yang digambarkan dari Kementerian/Lembaga akan memberikan efek multiplier yang berasal dari belanja yang dilakukan pemerintah. Selain mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah, penyerapan anggaran yang merupakan salah satu bentuk konsumsi yang dilakukan pemerintah dapat menggerakkan sektor swasta. Terlebih lagi, apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Terkait dengan hal ini, pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sangat fokus terhadap realisasi penyerapan anggaran, untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015).

Fenomena yang menarik yang terjadi saat ini yaitu rendahnya tingkat penyerapan anggaran baik di tingkat pusat seperti lembaga kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Mencermati permasalahan penyerapan anggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah setiap tahun yang menunjukkan fenomena penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan bahkan hingga melewati triwulan kedua. Daya serap anggaran yang masih rendah menjadi isu besar dalam manajemen keuangan pemerintahan. Hampir di setiap paruh kedua tahun anggaran, banyak pihak meributkan daya serap anggaran yang rendah. Banyak pihak menuding hal ini berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik dan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Penganggaran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan anggaran, karena jika dilakukan dengan baik akan memudahkan dalam pelaksanaan anggaran (BPKP, 2011). Rendahnya penyerapan anggaran tersebut muncul di saat tuntutan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah semakin

transparan dan akuntabel dalam rangka menuju good government governance dan tuntutan untuk efektif dan efisien.

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Performance Based Budget lebih menitikberatkan pada kinerja dibandingkan dengan penyerapan itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output dan outcomenya. Namun variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi (BPKP, 2011).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merilis data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga memasuki triwulan ke empat tahun ini (2018) masih mencapai 60 persen dari total APBD yang sebesar Rp8,488 triliun (Biro Keuangan Pemprov Sumut, 2015).

Realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2017-2019 berdasarkan realisasi pendapatan, belanja operasional, belanja modal dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50
2	Belanja Operasional	4.119.300.403.261,40	3.396.569.832.362,53
3	Belanja Modal	1.411.306.657.578,00	997.475.991.902,00
4	Pembiayaan Nette	30.461.191.559,59	30.461.191.559,79

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2017

Tabel.2 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53
2	Belanja Operasional	4.274.124.864.704,00	3.455.113.095.305,68
3	Belanja Modal	1.168.438.057.824,00	753.996.886.210,07
4	Pembiayaan Nette	28.701.504.535,76	28.701.504.535,76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2018

Tabel.3 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	6.257.239.035.331,00	5.518.772.179.306,31
2	Belanja Operasional	4.992.707.636.172,86	4.066.127.201.868,64
3	Belanja Modal	1.300.255.956.255,19	992.661.245.694,74
4	Pembiayaan Nette	47.316.909.942,05	48.867.092.635,07

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2019

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategorisasi mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif dan Halim, 2013).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor Walikota Medan Sumatera utara yang berada di Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara.

Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara purposive sampling, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling. Sampel penelitian ini adalah 64 SKPD yang ada di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sebelum data diolah lebih lanjut, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen. dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis) dan uji residual untuk moderating variabel. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis Penelitian

3. HASIL PENELITIAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Tabel.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98622828
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.051
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat uji statistik normalitas menggunakan 1 Sample-KS menunjukkan nilai Asymp. sig, (2-tailed) > α (0,200 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel.5 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_Pencapaian	.769	1.301
X2_Administrasi	.958	1.044
X3_Kompetensi SDM	.677	1.478
X4_Dokumen	.841	1.189
X5_GU	.885	1.130

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel, nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikoleniaritas adalah nilai tolerance harus $\geq 0,1$ atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel ≤ 10 . Dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel.6 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			T	sig
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.528	1.380		1.832	.072
X1_Pencanaan	-.003	.050	-.009	-.061	.951
X2_Administrasi	-.044	.050	-.111	-.888	.378
X3_Komp SDM	-.089	.056	-.237	-1.590	.117
X4_Dokumen	.084	.044	.255	1.912	.061
X5_GU	-.050	.046	-.142	-1.092	.280

a. Dependent Variable: Abs_res1

Berdasarkan pada tabel 4.13, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser diperoleh nilai sig dari masing-masing variable independen lebih besar dari (>) tingkat kepercayaan (α) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel.7 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.045	2.258		.463	.645
X1_Pencanaan	.190	.082	.182	2.322	.024
X2_Administrasi	.043	.081	.037	.525	.602
X3_Komp SDM	.711	.092	.647	7.742	.000
X4_Dokumen	.063	.072	.065	.874	.386
X5_GU	.200	.075	.194	2.656	.010

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan regresi berikut ini :

$$Y = 1,045 + 0,190_X1 + 0,43_X2 + 0,711_X3 + 0,063_X4 + 0,200_X5$$

Dari persamaan regresi linier di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta (a).

Konstanta bernilai positif pada seluruh variabel, hal ini menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah, artinya penyerapan anggaran akan meningkat seiring dengan meningkatnya perencanaan (X1), administrasi (X2), kompetensi SDM (X3), dokumen (X4), dan pengajuan GU (X5). Nilai konstanta bernilai 1,045 berarti jika variabel independen dalam model bernilai nol, penyerapan anggaran dapat terjadi sebesar nilai konstanta.

2. Perencanaan (X1) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,024 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perencanaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

3. Administrasi (X2) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya administrasi maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kualitas administrasi maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran sebesar.

4. Kompetensi SDM (X3) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia sebesar maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran sebesar. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

5. Dokumen Pengadaan (X4) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,386 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel dokumen pengadaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas dokumen pengadaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

6. Ganti Uang Persediaan (X5) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,010 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

a. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel.8 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.703	1.028

a. Predictors: (Constant), X5_GU, X4_Dokumen, X2_Administrasi, X1_Pencapaian, X3_kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Berdasarkan tabel diketahui nilai R Square sebesar 0,726 hal ini menunjukkan variabel perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen, ganti uang persediaan, sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 72,6 % dengan variabel penyerapan anggaran sebagai variabel dependen, Nilai Adjusted R Square sebesar 0,703 berarti variabel kemampuan penyerapan anggaran sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU sebesar 70,3%, sedangkan sisanya 29,7% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Tabel.9 Uji Statistik F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	162.473	5	32.495	30.757	.000 ^b
	Residual	61.277	58	1.056		
	Total	223.750	63			

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

b. Predictors: (Constant), X5_GU, X4_Dokumen, X2_Administrasi, X1_Pencapaian, X3_kompetensi SDM

Sumber : Hasil Penelitian, 2021 (Data Diolah)

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi F hitung pada taraf nyata 5 %, Dari tabel 4.16, diperoleh nilai F adalah 30.757 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan secara simultan variabel perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran.

c. Uji Statistik t

Tabel.10 Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a			t	Sig
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
X1_Pencanaan	.190	.082	.182	2.322	.024
X2_Administrasi	.043	.081	.037	.525	.602
X3_Komp SDM	.711	.092	.647	7.742	.000
X4_Dokumen	.063	.072	.065	.874	.386
X5_GUP	.200	.075	.194	2.656	.010

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diambil nilai t hitung dan nilai signifikansi sebesar Perencanaan (2.322 - 024), Administrasi (525 – 602), Kompetensi SDM (7.742 – 000), Dokumen Pengadaan (874 – 386), dan Ganti Uang Persediaan (2.656 – 010). sehingga dapat disimpulkan secara simultan variable perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel.11 Hasil Pengujian Hipotesis

Independen	→	Dependen	T Statistik	Sig	Kesimpulan
Perencanaan (X1)	→	Penyerapan Anggaran	2.322	0.024	Diterima
Administrasi (X2)	→	Penyerapan Anggaran	0.525	0.602	Ditolak
Kompetensi SDM (X3)	→	Penyerapan Anggaran	7.742	0.000	Diterima
Dokumen Pengadaan (X4)	→	Penyerapan Anggaran	0.874	0.386	Ditolak
GUP (X5)	→	Penyerapan Anggaran	2.656	0.010	Diterima

Berdasarkan hasil hipotesisnya pada table, variabel perencanaan, kompetensi SDM, dan pengajuan GUP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Administrasi dan dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. Kompetensi SDM merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

4. PEMBAHASAN

1. Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran

Hasil pengujian pengaruh variabel perencanaan terhadap variable penyerapan anggaran dalam penelitian ini menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan sebesar 0,024 yang lebih kecil dari (α) = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif pada penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perencanaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden untuk variabel perencanaan menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa penyusunan anggaran masih dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, masih terdapat program yang diajukan tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi, masih terdapat program yang dilaksanakan tanpa memperhitungkan kelayakan komposisi belanja, masih program yang belum mendapat persetujuan dari DPRD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan mempengaruhi adanya revisi pengeluaran anggaran, dimana adanya revisi DPA karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat menunda realisasi anggaran sehingga

berdampak pada penyerapan anggaran. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan proram kegiatan yang telah disusun tidak menemui hambatan sehingga penyerapan anggaran akan berjalan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purtanto (2015) menyatakan bahwa faktor perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) yang menyatakan bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

2. Pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya administrasi maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel administrasi rata-rata responden merasa proses administrasi yang dilaksanakan di SKPD masing-masing belum berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dari jawaban responden yang menyatakan bahwa masih terjadi kesalahan dalam penentuan akun program kegiatan, masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu singkat, verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD, SK Panitia Lelang terlambat ditetapkan. Berbagai permasalahan ini tentu berdampak terhadap pelaksanaan program kegiatan di SKPD responden.

Hal ini sejalan dengan penelitian Priatno dan Khusaini (2013) yang menyatakan bahwa faktor administrasi mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Penelitian Herriyanto (2012) juga menyatakan bahwa faktor administrasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

3. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel kompetensi SDM mayoritas responden menyatakan bahwa aparaturnya pelaksana pengadaan kurang berkompeten dalam menangani program/kegiatan, adanya kekhawatiran Pejabat Pengadaan akibat pemberitaan penangkapan dengan tuduhan korupsi, responden menyatakan kurang setuju bahwa adanya rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya, responden menyatakan kurang setuju bahwa adanya keengganan menjadi pejabat pengadaan karena tidak adanya keseimbangan resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, responden menyatakan kurang setuju jika sering terjadi mutasi Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan. Dari tabulasi kuisisioner mengenai latar belakang pendidikan, mayoritas PPK dan bendahara SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yaitu hanya 4 orang dari 64 responden seluruh SKPD di Kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaharuddin (2012) yang menyatakan bahwa faktor kapasitas sumber daya manusia berperan mempengaruhi penyerapan belanja Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010. Arif dan Halim (2013) juga menyatakan hal yang sama bahwa faktor kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD tahun 2011. Sedangkan dalam penelitian Purtanto (2015) menyatakan

bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,386 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden pada variabel dokumen pengadaan mayoritas responden menyatakan masih adanya dokumen kontrak yang belum ditandatangani karena terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender, adanya berkas SPJ tidak lengkap saat pengajuan GU/TU, adanya berkas Pengadaan Kontrak dan Lelang tidak lengkap saat pengajuan LS, masih adanya terjadi gagal bayar akibat salah dalam penentuan kode rekening dalam dokumen pengadaan, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa proses penataan dokumen pengadaan yang dilaksanakan di SKPD masing-masing belum berjalan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Herriyanto (2012) yang menyatakan faktor dokumen pengadaan berpengaruh positif mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Penelitian yang dilakukan Priatno dan Khusaini (2013) juga menyatakan bahwa faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.

5. Pengaruh ganti uang persediaan terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan sebesar 0,010 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran.

Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran. Berdasarkan tabulasi kuisisioner, mayoritas responden menyatakan bahwa masih terjadi kegiatan telah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU), responden juga menyatakan bahwa adanya pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar, responden juga menyatakan bahwa masih terjadi Up tidak digunakan sesuai peruntukannya, responden juga menyatakan masih terjadi pengajuan UP tidak sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan (GU) yang dilaksanakan di SKPD masing-masing masih belum berjalan maksimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) yang menyatakan bahwa ganti uang persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

4. KESIMPULAN

Dari analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.
2. Administrasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.

4. Dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.
5. Ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.

6. REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 1(2), 181-191.
- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Hasibuan, L. S., Handayani, S., & Bismala, L. (2022). Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan Pelaku Ukm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 86-93.
- Fitriany, Nur. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun (studi di Kota Pekalongan tahun 2013). Tesis. Semarang: Universitas stikubank. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/pasca1/article/view/2493>
- Forrester, John P & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review* 52(5): 467- 473.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Edisi 6. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, D. K., Arif, M., Azhar, M. E., & Mukmin, M. (2021). Peran Mediasi Brand Satisfaction Pada Pengaruh Self Congruity Terhadap Brand Loyalty. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 72-85.
- Hafni, R., Hanum, Z., & Hasibuan, L. S. (2022, March). Strategy for Utilizing Quantity Method Software in the Development of Operations Research Course with Realistic Mathematics Educations Approach. In *7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)* (pp. 204-209). Atlantis Press.
- Hafiz, M. S., & Wahyuni, S. F. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 63-78.
- Hani, S. (2021). [TURNITIN] Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept of Sharia Financial Statements. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2022). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 125-135.
- Hani, S. (2021). [Prosiding] MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGUKUR. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hani, S. (2021). [MODUL] PETUNJUK DAN TATA CARPELAKSANAAN PAJAK RESTORAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Muis, M. R., Gultom, D. K., Jufrizen, J., & Azhar, M. E. (2020). Model Elektronik Word of Mouth: Citra Destinasi, Kepuasan dan Loyalitas Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 21(1), 1-19.
- Sanjaya, S., & Sipahutar, R. P. (2019). Pengaruh Current Ratio, Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 136-150.
- Sanjaya, S. (2018). Analisis Du Pont System dalam Mengukur Kinerja Keuangan PT. TASPEN (PERSERO). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 17(1).
- Rahayu, S. E., RS, P. H., & Sinambela, E. (2022). Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat Dalam Mencapai Blue Economy. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(1), 119-131.
- Siregar, F. S., Hafiz, M. S., & Pradesyah, R. (2022, November). FACTORS AFFECTING STUDENT REGISTRATION IN THE MBKM PROGRAM OVERSEAS STUDENT EXCHANGE. In *Proceeding*

- International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 2, pp. 115-128).
- Sari, P. (2019). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan Pada PT. Sry Rahayu Agung 2019 (Doctoral dissertation).
- Sembiring, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dagang Di Bursa Efek Indonesia. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(1), 59-68.
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2021, March). Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Era Digital Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 223-234).
- Nainggolan, E. P., & Febriansyah, A. R. (2021, August). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 27-33).
- Siregar, M., & Azmi, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK NO. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 100-111.
- Wahyuni, S. F., Hafiz, M. S., & Pradesyah, R. (2023). MSME DEVELOPMENT MODEL IN CONVENTIONAL BANKS IN MEDAN CITY. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 755-761.
- Gunawan, A., Koto, M., Fadly, B., & Hafiz, M. S. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Syariah Bagi Warga Muhammadiyah Kota Medan. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(1), 55-62.
- Febriaty, H., & Winda, W. T. A. (2022). Pelestarian Lingkungan Dengan Penanaman Tumbuhan Dan Pembuatan Tempat Sampah Dari Bahan Daur Ulang Di Desa Medang Kabupaten Batu Bara. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 124-135.
- Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, UMSU).
- Nainggolan, E. P., & Lorenza, S. (2021, November). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Kulit Kerang Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 783-796).